

KURIOSITAS

Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan

Volume 15

No.1, Juni 2022

Halaman 97-121

Cyberfeminisme: Pembebasan Psikologi Perempuan di Ruang Digital

Kholil Lur Rochman, Wahyu Budiantoro

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

kholil_uinsaizu@yahoo.com, budiantoro.wahyu@yahoo.co.id

ABSTRACT

Cyberfeminism emerged as a feminist response to cyberpunk politics, as well as the development of communication technology in the digital space. The agenda of women's liberation in cyberfeminism, echoed by feminists, is to fight subordination. In practice, subordination refers to, among other things, gender inequality. Sexual violence that often afflicts women is often a manifestation of the position of women who are considered weak. Moreover, sexual violence is also targeted online. This is evident from the rise of Online Gender-Based Violence (KGBV). Thus, in this study, the author attempts to describe how cyberfeminism is a way to liberate women from sexual violence. This research uses descriptive qualitative method. The data is obtained through books, papers, or related articles as a support to clearly describe the formula used by feminists. The results of this study indicate that as a way to liberate women in the digital space, it is necessary to have a media with a gender perspective. In addition, feminists and women need to have the power of data as a basis for carrying out the path of liberation.

Keyword: Cyberfeminisme, Woman, Digital Space

ABSTRAK

Cyberfeminisme muncul sebagai respons feminis terhadap politik *cyberpunk*, sekaligus perkembangan teknologi komunikasi di ruang digital. Agenda pembebasan perempuan pada *cyberfeminisme*, yang digaungkan oleh feminis adalah melawan subordinasi. Pada praktiknya, subordinasi merujuk kepada, salah satunya, ketidakadilan gender. Kekerasan seksual yang kerap menimpa perempuan seringkali merupakan manifestasi kedudukan

perempuan yang dianggap lemah. Terlebih lagi, kekerasan seksual juga turut menyasar secara daring. Terbukti dari maraknya Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO). Sehingga, dalam penelitian ini, penulis berupaya menggambarkan bagaimana *cyberfeminisme* menjadi jalan pembebasan perempuan dari kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui buku, makalah, ataupun artikel yang terkait sebagai penunjang untuk menggambarkan secara gamblang formula yang digunakan oleh para feminis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai jalan pembebasan perempuan di ruang digital, perlu adanya media yang berperspektif gender. Selain itu, para penganut feminis dan perempuan perlu memiliki kuasa data sebagai pijakan untuk melakukan jalan pembebasan.

Kata Kunci: *Cyberfeminisme*, Perempuan, Ruang Digital

PENDAHULUAN

Ruang digital menjadi salah satu produk kemajuan teknologi komunikasi. Alat yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan mengolah pesan telah mengalami reformasi. Perubahan yang drastis ini melahirkan ruang digital berbentuk *cyberspace*. Meminjam istilah Habermas, ruang digital menjadi arena deliberatif. Mereka akan saling melempar tanggapan, opini, kritik, bahkan memunculkan wacana secara virtual. Selanjutnya, akan terjadi proses diskusi yang melibatkan partisipasi publik secara otoriter. Ruang digital ini kemudian berkembang menjadi ruang publik baru (*new public sphere*), yang kewenangannya dipegang penuh oleh publik.

Dalam konsep Habermas mengenai “situasi perbincangan ideal”, struktur komunikasi itu bebas dari hambatan. Hal ini baru terjadi jika semua partisipan mendapat pembagian simetris dari kesempatan untuk memilih dan mempergunakan *speech act*. Struktur pemikiran Habermas kalau kita telusuri telah menggantikan perjuangan kelas sebagai revolusi fisik dengan perjuangan kelas sebagai hubungan dialogal (Heriyanto, 2018:

281). Namun, hubungan perempuan dengan teknologi memang sebagian besar dipandang tidak serasi. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa teknologi bukanlah milik perempuan. Saat ini, ranah teknologi lebih didominasi laki-laki. Maka dari itu, banyak kalangan feminis yang mengatakan bahwa teknologi memiliki bias gender (Gamble, 2002: 103).

Teknologi seolah memiliki sifat maskulin. Sementara sifat feminin yang melekat pada perempuan dianggap tidak selaras dengan cara kerja teknologi. Sehingga, hadirnya teknologi komunikasi berbentuk ruang digital menjadi angin segar bagi perempuan. Sebab, teknologi komunikasi dapat diakses lebih mudah. Selain itu, teknologi komunikasi juga digadag-gadag dapat menjadi arena menyampaikan gagasan pembebasan perempuan. Gagasan ini hadir sebagai wacana untuk melawan subordinasi terhadap perempuan. Gagasan ini masuk ke dalam gerakan yang disebut feminis. Wacana kesetaraan gender yang semula hanya sebagai gerakan sosial, kini berubah menjadi ideologi perlawanan yang membebaskan perempuan.

Marginalisasi perempuan yang muncul menimbulkan pandangan bahwa perempuan menjadi *"the second sex"* yang keberadaannya tidak begitu diperhitungkan dan inferior terhadap hegemoni yang dimiliki oleh laki-laki. Perlakuan tidak adil dalam masyarakat terhadap perempuan bila dibandingkan dengan laki-laki menimbulkan kesadaran gerakan perempuan (Andarwulan, 2017). Muncul juga pengakuan yang semakin meningkat bahwa, sementara kaum feminis Barat telah berjuang melawan seksisme dan melawan ketidaksetaraan sosial dan politik, para wanita di Negara Dunia Ketiga harus menghadapi masalah-masalah tambahan yang bahkan lebih sulit dipecahkan. Mereka sering memerangi seksisme dalam

bentuk kepercayaan dan praktik lokal yang mengakar, berkaitan dengan kelas, kasta, agama dan bias etnis (Walters, 2021: 172).

Dalam relasi gender yang konvensional, seringkali yang menjadi perbincangan adalah peran biologis, organ, perbedaan seks, *phallus*, *fetishism voyeurism*, objek hasrat (*desiring object*). Sementara, pada hiperfeminisme semua perbincangan meluas ke dalam relasi-relasi baru yang melibatkan teknologi ke dalamnya. Misalnya dalam konteks: *cyber-organism* (*cyborg*), virtual organ, fetisisme teknologi, mesin hasrat, yang di dalamnya pandangan-pandangan mengenai hasrat, kesenangan, kepuasan, orgasme, mengalami beragam perubahan dan transformasi mendasar.

Akses informasi yang ditawarkan oleh ruang digital, berpotensi untuk menciptakan "situasi perbincangan yang ideal". Sebagai sosok yang kerap mengalami subordinasi, perempuan nantinya tidak hanya menjadi subjek pasif. Tetapi juga menjadi aktor yang ikut terlibat dalam arena deliberatif (Gun Gun Heryanto, 2017: 281) menyatakan bahwa bentuk-bentuk ala *salon* dan *coffee house* mungkin berubah menjadi *virtual communities*, *electronic coffes*, *bulletin board*, *e-mail*, atau *teleconference*. Peran pengisi ruang antara kekuatan negara dan *civil society* sebenarnya dapat diisi oleh media massa. Media dapat memainkan peranan signifikannya dalam membentuk dan menyebarkan informasi dalam pembentukan opini publik.

Kemudahan akses media dalam perkembangan teknologi ini dibuktikan pada tahun 2000-an pengguna internet perempuan mengalami peningkatan mencapai 50 persen (Mulyaningrum, 2015:1). Kemudahan akses itulah yang dimanfaatkan perempuan untuk bebas mengekspresikan dan ide-idenya dari kurungan budaya patriarki (Mulyaningrum, 2015: 2). Munculah istilah cyberfeminisme sebagai bukti eratnya kaitan feminisme

dengan internet yang bertujuan untuk melawan subordinasi melalui media baru (Alatas & Sutanto, 2019: 167).

Berangkat dari asumsi itulah, para feminis kian gencar menyuarakan pemberdayaan perempuan lewat media baru. Di mana *cyberspace* menjadi ruang berinteraksi dan wadah pembebasan dari dominasi maskulinitas yang paling mungkin dilakukan secara feminis. Istilah *cyberfeminisme* yang kemudian lahir mulai membuka diri pada perdebatan perempuan dan teknologi baru di era 1980-an (Umami, 2020: 4). Sehingga, muncul beragam media alternatif yang turut serta fokus pada kaum marginal, salah satunya mengangkat isu mengenai ketidakadilan terhadap perempuan. Media alternatif itu seperti projectmultatuli.org, magdalene.id, dan konde.co.

Manifestasi ketidakadilan terhadap perempuan salah satunya adalah kekerasan seksual. Belakangan, kasus kekerasan seksual tengah meledak. Satu per satu kasus di lingkaran akademik mulai bermunculan. Hal ini terjadi menyusul diterbitkannya Permendikbudristek oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Kasus kekerasan seksual memang seperti fenomena gunung es. Hanya permukaannya yang nampak, sementara jumlah keseluruhan korban di lapangan kerap sulit diketahui. Minimnya laporan terhadap kasus kekerasan seksual terjadi diakibatkan perempuan seringkali menempati posisi yang lemah.

Fakta menunjukkan bahwa kekerasan gender berbasis online sangat marak. Hal ini ditengarai oleh Arianto dalam penelitiannya berjudul "Media Sosial sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia". Menurutnya, kekerasan gender di media online dilatarbelakangi beberapa aspek, antara lain: pengetahuan, kontrol sosial dan sensitivitas gender. Perlu ada edukasi bagi perempuan, misalnya, dalam konteks penguatan literasi digital (Arianto, 2021).

Kekerasan gender berbasis online juga bisa dilakukan dengan modus pemerasan (sekstorsi). Dalam riset Christian berjudul “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia” diterangkan bahwa fenomena sekstorsi terjadi bila korban menuruti kemauan pelaku karena ada unsur paksaan. Pada tahun 2019 misalnya, terdapat kasus yang menyeret Brigpol DS yang menyebarkan foto pornografi atas korbannya karena korban menolak mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku sebagai bentuk ancaman/ pemerasan (Herry Christian, 2020).

Di Era Covid, banyak kasus kekerasan gender berbasis online terjadi. Dokumen Rilis Pers SAFEnet 2021 menerangkan bahwa angka kasus kekerasan gender berbasis online selama pandemi mengalami peningkatan, bahkan mencapai tiga kali lipat atau mengalami lonjakan 300% (940 kasus). Sebab, pada tahun sebelumnya, 2018 dan 2019, menurut catatan Komnas Perempuan, ada 97 kasus (2018) dan 241 kasus (2019) kasus kekerasan gender berbasis online (Hayati, 2021). Fenomena ini seharusnya berdampak pada kesadaran individu maupun kolektif untuk melakukan rekonstruksi maupun reformulasi hukum yang berlaku (Ira Maulia Nurkusumah, 2021), termasuk membangun pendekatan *cyberfeminism*.

Lahirnya *cyberfeminism* menjadikan media baru sebagai arena atau alat layanan pengaduan pelecehan di ruang digital. Baru-baru ini, kasus pelecehan seksual di Universitas Riau juga terkuak. Terduga korban pelecehan seksual akhirnya berani bersuara. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM UNRI) mengunggah video kronologis pelecehan seksual melalui akun Instagram @komahi_ur. Terduga korban pelecehan seksual adalah mahasiswi yang tengah bimbingan skripsi. Mahasiswi ini mendapatkan pelecehan seksual dari dosen pembimbingnya. Media baru

sebagai inovasi teknologi komunikasi ini, setidaknya menjadi alternatif para korban pelecehan seksual untuk bersuara.

Lebih jauh, *cyberfeminism* juga dapat dipahami sebagai sebuah gerakan yang memberikan nilai dan paham feminisme dengan memanfaatkan teknologi. Tujuan yang diinginkan adalah untuk mendapatkan kesempatan bagi para perempuan agar dapat terhubung satu sama lain, dan membantu mereka belajar dalam menyuarakan aspirasi mereka secara online. *Cyberfeminism* juga percaya bahwa mereka belajar dalam menyuarakan aspirasi mereka secara online. *Cyberfeminism* juga percaya bahwa melalui pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan sebuah peluang terciptanya kesetaraan gender (Istiarohmi, 2020).

Dalam penelitian ini, penulis fokus pada upaya para feminis membuat formula baru dalam gerakan pembebasan perempuan. Di mana gerakan tersebut dimanifestasikan menjadi *cyberfeminism*. Selain itu, penulis juga fokus pada agenda pembebasan perempuan untuk melawan ketidakadilan berupa kekerasan seksual. Terlebih, kekerasan seksual sekarang tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga bergeser menjadi Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif. Kualitatif digunakan karena memiliki corak deskriptik dan interpretatif (Sugiyono, 2007). Corak tersebut relevan dengan riset ini karena data akan diolah melalui interpretasi paradigma tertentu. Pasalnya, penelitian ini tidak berusaha untuk menjabarkan hubungan sebab akibat. Tidak hanya itu, variabel dalam penelitian ini juga tidak memiliki status berupa independen, dependen, antecedent, dan variabel lainnya. Penelitian ini hanya menggambarkan atau memberikan deskripsi bagaimana

cyberfeminisme menjadi media atau alat gerakan pembebasan perempuan yang digencarkan oleh feminis.

Secara spesifik, peneliti melakukan penelusuran kepustakaan (*libraury research*). Kemudian menjadikan *cyberfeminisme* untuk mengkampanyekan agenda pembebasan perempuan secara daring berbasis literasi. Serta menggambarkan aksi kolektif untuk mendukung regulasi yang berpihak pada terciptanya ruang aman bagi perempuan. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran kepustakaan berupa buku, makalah, artikel ilmiah, dan hal lain yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Literasi Digital bagi Perempuan

Literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer (Kemendikbud, 2017). Karena berskala nasional, literasi digital idealnya mengikis bias gender. Artinya, perempuan dan laki-laki harus memperoleh porsi yang berimbang, baik kuantitas maupun kualitas.

Literasi digital menjadi keahlian yang harus dikuasai perempuan. Perempuan tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek aktif. Sehingga, perempuan tidak lagi menjadi korban yang sering mengemuka pada beberapa kasus, seperti dicopotnya beberapa anggota TNI AD akibat postingan seorang istri anggota pada peristiwa penusukan Wiranto (Erika, 2019).

Literasi digital bagi perempuan juga bisa mendorong mereka melakukan usaha produktif. Hal itu terlihat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi mereka, media sosial berperan penting untuk

meningkatkan aspek kognitif, sehingga daya kreativitas mereka meningkat (Widyastuti, Nuswantoro and Sidhi, 2016).

Akan tetapi, beberapa kasus yang melibatkan perempuan pada wilayah digital juga tidak sedikit. Dalam penelitian Arianto berjudul “Media Sosial sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO) di Indonesia”, ditemukan fakta bahwa KGBO sering terjadi karena minimnya literasi digital bagi perempuan (Arianto, 2021; Hayati, 2021).

Persoalan KGBO ditengarai oleh Nurkusumah terjadi karena penegakan hukum yang lemah. Menurutnya, UU ITE dan/atau UU Pornografi tidak menimbulkan efek jera, sehingga perlu rekonstruksi dan reformasi sanksi pidana bagi pelaku (Ira Maulia Nurkusumah, 2021). Argumen Nurkusumah mengafirmasi hasil penelitian Christian yang mengetengahkan isu sekstorsi, KGBO dengan pemerasan. Perlu ada perlindungan signifikan dari hukum (UU Perlindungan Saksi dan Korban) atas fenomena KGBO (Herry Christian, 2020).

Konsep Cyberfeminisme

Cyberfeminisme tidak hadir dari ruang hampa. Ide ini bermula dari Donna Harraway yang menggagas *cyborg manifesto*. *Cyberfeminisme*, menurut Harraway, merupakan hasil identifikasi feminisme baur yang melibatkan gambaran tentang *cybernetic organisme* (*cyborg*). Istilah *cyborg* diciptakan oleh Manfred Clynes pada 1960. Dalam prosesnya, *cyborg* merupakan kombinasi antara mesin dan organisme. Visi utama pada *cyberfeminisme* adalah meleburkan batas antara manusia dengan mesin. Sehingga, membuat kategori pengelompokan jenis kelamin tidak terpakai lagi. Harraway pun menegaskan bahwa, komunikasi elektronik *cyborg*, membuat yang *artificial* dan alami menjadi ambigu.

Sebagai teknologi yang bertumpu pada penciptaan *realitas artificial* – realitas virtual (*virtual reality*) pada *cyberspace*, dan realitas hybrid (*hybrid reality*) pada *cyberspace*, dan realitas hibdrid (*hybrid reality*) pada *cyborg* – kedua. Teknologi ini telah mengubah konsep dasar tentang gender, seks, seksualitas, diri, subjektivitas, dan kelas sosial. *Cyberspace* dan *cyborg* telah menggiring kategori gender tersebut ke arah kondisi pembiakan (*multiplicity*), pengembangan (*floating*), dan ketidak-stabilan (*instability*) (Sadari, 2016: 139).

Melihat realitas tersebut, feminis berusaha untuk menciptakan kesetaraan. Feminis berupaya menghilangkan subordinasi, stereotipe, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan melalui teknologi. *Cyberfeminsme* menurut *Dictionary of Media Studies* (2006: 58) adalah studi mengenai teknologi-teknologi baru dan pengaruhnya terhadap isu-isu perempuan. Kemunculan *cyberfeminisme* menurut dapat didefinisikan berkaitan dengan asal-usulnya dalam teori dan praktek feminis akhir 1980-an dan awal 1990-an, yang berkaitan dengan kemunculan teknologi mengenai revolusi informasi.

Hal itu menjadi bagian dari respon terhadap politik anarkis *cyberpunk*. *Cyberfeminisme* kemudian menjadi mazhab penting dari studi *cyberculture* dan feminisme, dan telah mengembangkan serangkaian perhatian utama, termasuk isu-isu pemisahan tubuh/pikiran, visi masyarakat fokus yang pada isu-isu seperti identitas dan komunitas sosial. *Cyberfeminisme* kemudian menjadi strategi politik serta metode artistik paling aktif di tahun 1990-an (Alatas & Sutanto, 2019: 168).

Nicholas Stevenson dalam bukunya *Understanding Culture* melihat *cyberfeminisme* sebagai gerakan akademis dan politik yang paling signifikan dari abad informasi. Dalam pandangan Stevenson,

cyberfeminisme telah membawa transformasi struktural yang besar, yang terkait dengan keprihatinan dengan perpecahan gender dan cara berpikir maskulin. Kemunculan *cyberfeminisme* ini selain sebagai respons terhadap politik anarkis *cyberpunk*, juga merupakan upaya untuk terlibat aktif ke dalam teknologi komunikasi yang berkembang menjadi lebih pesat.

Hal itu merujuk kepada pendapat yang mengatakan bahwa perempuan lebih dekat dengan alam, bukan teknologi. Pendapat itu, tidak jauh dari pengetahuan tertentu mengenai sifat maskulin dan feminin. Mereka berpendapat bahwa perempuan memiliki sifat yang lemah lembut dan memiliki emosi yang tidak stabil, sehingga tidak cocok untuk menggunakan teknologi. Namun, hadirnya media baru (*new media*), sebagai hasil dari teknologi komunikasi, dapat dijangkau oleh perempuan.

Sadie Plant dalam (Gamble, 2002: 270-271) mempunyai definisi lain. Ia berpendapat bahwa *cyberfeminisme* adalah "suatu pemberontakan atas bagian barang-barang dan material-material dari kemunculan patriarkal yang terdiri atas mata rantai perempuan, perempuan dan komputer, komputer dan jaringan-jaringan komunikasi, penghubung dan mesin-mesin penghubung. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa perempuan tidak dibahayakan oleh teknologi, dan harus merebut kendali dari sistem informasi baru. Menurut Gamble, menjadi penanda sebuah utopianisme *cyberfeminisme*.

Kendati begitu, sebagai sebuah perspektif, *cyberfeminisme* dapat memberikan ruang pada perempuan. Sehingga para perempuan bisa merebut peluang yang disediakan oleh teknologi informasi untuk mengangkat bahu melawan hambatan peran tradisional mereka. Judy Wajcman dalam esainya "The Gender Politics of Technology" menyatakan bahwa munculnya *cyberfeminisme* telah memberikan suara ke aliran baru dari

teori gender yang mencakup ide-ide utopis *cyberspace* menjadi area bebas gender (*gender-free*) yang menjadi kunci bagi pembebasan perempuan (Alatas & Sutanto, 2019: 170).

Cyberfeminisme dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Media Baru

Berkat teknologi komunikasi yang mengalami perubahan secara drastis, para aktivis mulai menata kembali formula yang tepat pada gerakannya. Kemunculan *cyberfeminisme* merupakan gerakan pembebasan perempuan yang dilakukan feminis secara daring. Gerakan ini memiliki agenda menyebarkan gagasan pembebasan perempuan melalui media baru (*new media*). Dalam prosesnya, teknologi ini menawarkan kemudahan untuk terlibat menjadi subjek. Baik untuk mengakses informasi maupun menciptakan jaringan.

Hadirnya *cyberfeminisme* mesti dimanfaatkan oleh feminis, serta dirayakan sebagai sebuah ruang pembebasan. Karena *cyberfeminisme* menawarkan sebuah utopia mengenai pembebasan; pembebasan dari dominasi dan subordinasi, serta pembebasan dari teknologi yang dikuasai laki-laki. Visi pembebasan ini berawal dari citra mengenai *cyborg*, yakni terjadinya pengaburan batas-batas antara manusia dan mesin pada akhirnya akan membuat kategori laki-laki dan perempuan tidak terpakai, dan dengan demikian, membuka lebar jalan kepada sebuah dunia dengan kebebasan (Alatas and Sutanto, 2019).

Berkenaan dengan itu, media baru juga berpotensi untuk membuat perempuan lebih berdaya. Sebab, ruang yang diciptakan melalui media baru begitu bebas dan tanpa batas. Namun, hasil dari penelitian Google Indonesia cukup mengejutkan. Pasalnya, jumlah penggunaan internet oleh perempuan lebih rendah dari laki-laki. Hal ini lantaran, menurut penelitian tersebut, perempuan kesulitan untuk mencari informasi yang dibutuhkan.

Dengan kata lain, informasi yang ada di internet belum sepenuhnya disediakan untuk perempuan.

Dari penelitian tersebut, hanya ada 37% perempuan yang mengaku menggunakan internet. Dari jumlah yang ada, kemungkinan 30%-50% lebih rendah dari laki-laki, perempuan belum menggunakan internet untuk berpartisipasi di ranah publik. Atau terlibat dalam kegiatan ekonomi secara daring. Informasi yang dicari oleh perempuan dan laki-laki juga berbeda. Menurut hasil survey dari Opera, perempuan cenderung lebih sering mencari informasi mengenai gaya hidup, kesehatan, dan hiburan. Sementara laki-laki, lebih suka mencari informasi olahraga, teknologi, dan kesehatan.

Namun, para feminis percaya bahwa media baru dapat mengeksplorasi perempuan untuk lebih produktif. Salah satunya kemunculan para perempuan yang berprofesi sebagai ojek *online*. Di mana profesi tersebut kerap diberi label sebagai profesi yang maskulin. Profesi yang merupakan pekerjaan laki-laki. Sehingga, perempuan tidak berani mengambil profesi itu, lantaran enggan diberi label negatif. Tetapi, sejak ada media baru, perempuan mampu berdaya dan ikut terlibat secara aktif dalam roda ekonomi melalui daring. Salah satunya menjadi ojek online.

Bagi beberapa sarjana feminis, potensi internet sebagai ruang untuk mengeksplorasi tanda yang murni telah membuka pandangan baru untuk eksplorasi pribadi dan pertumbuhan. Sebagaimana dikatakan Jesseca E. Brophy dalam esainya berjudul *Developing a Corporeal Cyberfeminism: Beyond Cyberutopia* (2010) anonimitas online telah membebaskan individu dari hambatan sosial dan fisik, dan telah memungkinkan perempuan untuk mengekspresikan bagian dari diri mereka sendiri bahwa mereka tidak mungkin dinyatakan dalam lingkungan yang aman, yang memungkinkan

mereka untuk mengeksplorasi identitas baru, menyembuhkan luka batin, dan mengekspresikan seksualitas. Dalam wacana seperti pembebasan, internet dapat menjadi tempat di mana perbedaan dan konteks sosial terhapus, menciptakan meritokrasi benar ataupun cita-cita utopis (Salim Alatas & Vinnawaty Susanto, 2019).

Dalam sudut pandang feminisme, perempuan bisa menjadi objektivikasi media. Satu sisi perempuan dieksploitasi dan menerima perlakuan tidak adil dari kaum pria, namun di sisi yang lain, banyak pandangan kritis dari perempuan. Para penulis feminis misalnya, mereka menganalisis secara kritis media yang menayangkan tubuh perempuan dalam masyarakat Barat patriarkhi. Seksplotation merupakan sebutan dari kaum feminis kritis yang menunjukkan ketidakadilan dari kalangan media karena eksploitatif terhadap tubuh perempuan (Asry, 2018).

Paradigma feminisme liberal memayungi suara perempuan yang kritis. Dalam *Feminist Thought*, Rosemarie Tong mengatakan bahwa:

“Feminis liberal memandang diskriminasi wanita yang diperlakukan tidak adil. Wanita seharusnya memiliki kesempatan yang sama dengan pria untuk sukses di dalam masyarakat. Menurut paradigma ini, keadilan gender dapat dimulai dari diri kita sendiri. Pertama, peraturan untuk permainannya harus adil. Kedua, pastikan tidak ada pihak yang ingin memanfaatkan sekelompok masyarakat lain dan sistem yang dipakainya haruslah sistematis serta tidak ada yang dirugikan.” (Sutanto, 2017; Sadasri, 2021).

Aspek regulasi dan kesadaran untuk tidak melakukan KGBO dalam pandangan Tong menjadi faktor signifikan. Maka dari itu, di media sosial banyak perempuan yang berusara lantang untuk melawan tindakan KGBO. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang berjuang melalui karya sastra dengan corak feminisme (Fitri, 2017; Yuniar *et al.*, 2019).

Cyberfeminisme: Pembebasan Psikologi Perempuan

Wacana kesetaraan gender belakangan ini telah berkembang menjadi program sosial yang diformat secara akademik dan disosialisasikan secara politis. Konsep yang menjadi basis wacana gender ini berasal dari masyarakat Barat yang telah lama mengalami problem hubungan antara wanita dan laki-laki. Konsep dari masyarakat Barat yang telah lama mengalami problem hubungan antara wanita dan laki-laki. Konsep ini terbentuk dari protes perempuan dalam sebuah gerakan yang disebut gerakan feminis (Andarwulan, 2017).

Namun, dalam setiap perbincangan dalam ruang privat sampai publik, masih terjadi bias gender. Di mana mereka tidak memiliki keyakinan atau pengetahuan yang pasti. Hanya sebatas asumsi berdasarkan peran laki-laki maupun perempuan menyatakan bahwa bias ini berkaitan dengan keyakinan adanya pemisahan antara ruang publik dan ruang privat. Ruang publik adalah tempat dan milik laki-laki, baik secara sosial-politik maupun ekonomi. Ruang privat adalah ranah perempuan, tempat mereka hadir dan beraktivitas. Biasanya kita anggap bagian dari ruang pertama adalah, lembaga-lembaga publik, partai politik, parlemen, dan lainnya yang sejenis. Sebaliknya, keluarga, merawat suami, membesarkan serta mendidik anak, aktivitas rumah tangga seperti memasak, belanja, merapikan rumah, dan lainnya yang sejenis sering diasumsikan sebagai bagian ruang kedua.

Bias gender ini menyasar ke dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah politik. Perempuan hanya dimasukkan ke dalam wilayah ilmu pengetahuan. Tetapi, tidak dilibatkan dalam penjelasan-penjelasan mengenai ilmu pengetahuan. Hal ini mendorong perempuan tidak memahami ilmu pengetahuan secara komprehensif. Sehingga, dalam

kenyataannya, proses menjadi perempuan disebabkan oleh nilai-nilai kultural dan bukan oleh hakikatnya.

Menurut Simon de Beauvoir, akar yang melanggengkan bias gender adalah masyarakat patriarki. Perempuan ditempatkan sebagai Liyan, menempati posisi kelas dua, yang bahkan lebih rendah dari kodratnya. Akibatnya, segala bentuk eksistensi sosial dan kultural perempuan keudukannya dipengaruhi. Masyarakat patriarki ini, dalam prosesnya memegang teguh fakta tertentu. Seperti fisiologi perempuan dan laki-laki sebagai dasar menentukan identitasnya, baik untuk berperan sebagai maskulin atau feminine. Hal ini bertujuan untuk memperdayakan laki-laki di sisi lain, dan melemahkan perempuan dari sisi yang lain.

Oleh karena itu, gerakan dan teori feminisme berjuang agar nilai-nilai kultural yang menempatkan perempuan sebagai Liyan, sebagai kelompok yang lain, yang termarginalkan, dapat digantikan dengan keseimbangan yang dinamis antara perempuan dan laki-laki. Salah satu gerakan yang dilakukan kaum feminis sebagai upaya memerdekakan dirinya “yakni keterlibatan dalam teknologi *cyber* atau diistilahkan dunia *cyber*. Ini kemudian dikenal sebagai *cyberfeminisme* (Andarwulan, 2017).

Representasi Feminis di Media Online

Internet dimanfaatkan oleh gerakan feminisme untuk menyebarkan paham-pahamnya sehingga memunculkan istilah *cyberfeminisme*. Tuntutannya semakin beragam sehingga memunculkan gerakan feminisme baru yaitu Feminisme Neoliberal. Feminisme jenis tersebut tidak lagi menuntut gerakan kesetaraan gender namun memperlihatkan ketimpangan yang dialami oleh perempuan dengan beban ganda (Dyan et al., 2021: 1).

Baik Indonesia maupun luar negeri, tuntutan feminisme semakin berkembang. Munculnya globalisasi dapat menjadi cikal perkembangan feminisme di seluruh dunia. Namun, globalisasi yang awalnya digadagadag dapat memperluas hubungan ekonomi, sosial maupun politik malah mendiskriminasi perempuan. Hal itu menyebabkan perempuan dieksploitasi tenaga dan tubuhnya pada sektor perekonomian. Itu bertujuan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya (Retyaningtyas, 2018: 74).

Perempuan yang kini juga berhubungan langsung dengan teknologi komunikasi seperti media baru (*new media*). Memunculkan gerakan feminisme dengan istilah *cyberfeminism*. Pada gerakan ini, perempuan melawan subordinasi melalui media baru. Kombinasi website dengan media baru juga menjadi salah satu solusi bagi perempuan untuk menyuarakan gagasannya. Seperti yang dilakukan media alternatif www.konde.co. Pada penelitian ini, penulis mengambil lima artikel untuk merepresentasikan agenda feminisme neoliberal.

Dari lima artikel www.konde.co (Dyan et al., 2021: 6), menyatakan bahwa artikel tersebut merepresentasikan agenda khas dari feminisme neoliberal yakni menunjukkan ketimpangan. Salah satunya adalah pemaksaan perempuan untuk terus berada di ranah domestik. Hal ini diperkuat oleh kutipan narasumber yang turut serta dicantumkan. Kendati ada beberapa artikel memuat peran laki-laki, namun para penulis terus mendominasi tulisan mengenai diskriminasi terhadap perempuan.

Psikologi Media yang Berperspektif Gender

Untuk mencapai kondisi kesetaraan gender maka, harus terlebih dahulu menciptakan keadilan gender. Keadilan gender dapat dipahami sebagai perlakuan bagi laki-laki dan perempuan berdasar pada kebutuhan-

kebutuhan mereka, mencakup setara atau perlakuan yang berbeda akan tetapi dalam koridor pertimbangan kesamaan dalam hak-hak, kewajiban, kesempatan-kesempatan, dan manfaat. Keadilan gender dapat tercipta apabila manifest dari ketidakadilan gender telah dihilangkan. Manifest yang dimaksud adalah stereotype, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban kerja (Istiarohmi, 2020: 27-31).

Pada ruang digital, kerap kali masih terjadi ketidakadilan gender. Salah satu manifest yang paling sering adalah kekerasan. Pasalnya, produksi berita pada media mainstream kerap menanggalkan lensa gender. Hal itu nampak dari masih banyaknya berita yang mengandung diskriminasi, seksisme, dan penindasan lainnya. Celaknya, media online yang menghamba pada klik, paling banyak yang memproduksi berita seksis. Pada situasi tersebut, seringkali diskriminasi dan seksisme menasar kepada perempuan. Mereka akan dijadikan sebagai objek seksualitas, kendati yang diraih adalah sebuah prestasi. Ini juga yang menimpa atlet bulu tangkis perempuan pada Olimpiade Tokyo 2020.

Ridho Permana jurnalis viva.co.id, menulis berita bernada seksis kepada atlet bulu tangkis perempuan. Dia bahkan sama sekali tidak menulis prestasi para pebulutangkis perempuan itu atau bagaimana performa mereka ketika di lapangan. Akan tetapi, malah mengomentari tampilan para atlet dengan imbuhan kata "ngilu". Hal ini sontak membuat warganet emosi. Lantas, berbondong-bondong untuk memaki Ridho dan men-*doxingnya*. Kendati begitu, sebenarnya percuma men-*doxing* sang jurnalis. Karena akan terus ada jurnalis lain seperti Ridho, sebab keberlangsungan hidupnya di media menghamba dari "klik".

Selain itu, produksi berita juga bukan hasil kerja jurnalis. Tetapi juga campur tangan sang redaktur. Nahasnya, Ridho tidak hanya menulis berita

bernada seksis satu satu kali. Sudah ada beberapa artikel lain yang juga mengandung seksisme. Normalnya, artikel atau berita yang berhasil diunggah adalah atas persetujuan redaktur. Serta mengalami penyuntingan oleh editor. Artinya, *newsroom* di mana Ridho bekerja, tidak menggunakan lensa gender. Tetapi, menggunakan kendali kapital untuk “menatap perempuan”.

Tidak hanya itu, hadirnya website bermuatan erotik atau seks yang bertebaran di dalam *cyberspace*, juga memperlihatkan bahwa penempatan posisi perempuan sebagai objek kesenangan ini justru jauh lebih terbuka, tanpa tabir pembatas, diorganisir dengan rapi, serta ditampilkan dengan kategorisasi yang sangat komprehensif. Di dalam website “night-surfing” misalnya, perempuan dieksplorasi habis-habisan sebagai objek kesenangan, dari mulai gadis sepuluh tahun (*Teen Girl*), dewasa (*Mature Women*), anak sekolah (*School Babes*), perempuan petani (*Farm Fantasy*), perempuan hamil (*Pregnant Show*), sampai perempuan tua (Sadari, 2016: 145).

Melihat realitas ini, harus ada media alternatif yang dapat mengkonter berita seksis. Sekaligus objektifitas perempuan dalam bentuk lain di *cyberspace*. Kehadiran media yang dapat melibatkan perempuan secara aktif, baik untuk memproduksi informasi maupun ikut andil mengambil alih dalam roda ekonomi, dapat menjadi oase. Media alternatif yang berspektif gender diharapkan bukan hanya bisa mengkonter berita seksis. Tetapi juga tetap menjaga eksistensinya dan lebih progresif.

Bahwa konsep media dengan perspektif gender dimunculkan untuk memberikan tempat bagi semua orang untuk mendiskusikan berbagai isu gender. Sehingga, semua orang bisa melakukan diskursus tentang feminisme dan isu gender lainnya dengan bebas. Oleh karena itu, akan

tercipta percakapan melalui media terkait isu gender yang ada (Sunarto, 2020: 154). Media berspektif gender juga berpotensi untuk menciptakan “situasi perbincangan ideal”. Media alternatif seperti Magdalene.id telah konsisten melakukan ini sejak 2009.

Terlebih lagi, Magdalene.id juga membuka kesempatan siapapun untuk mengirim tulisan. Menurut (Istiarohmi, 2020: 20), isu yang diangkat Magdalene.id yakni berkaitan dengan hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan politik, masyarakat, gender, seksualitas, dan relationship. Selain itu, Magdalene.id juga mengangkat pembahasan mengenai *lifestyle* dan *culture*. Lebih spesifik, ada pembahasan khusus mengenai perempuan dan laki-laki yang terdapat di rubrik *Wo/Men We Love* dalam website resminya.

Merebut Kuasa Data

Kemudahan setiap orang untuk mengakses data pribadi pihak lain tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi digital. Dalam logika teknologi digital data adalah kunci. Berbagai aplikasi di internet bekerja dengan meminta para pengguna aplikasi untuk menyerahkan data. Berbeda dengan logika gambar tulis tercetak, semua data digital yang dibagikan di internet itu tidak bisa benar-benar dihapus. Bahkan ketika si pengunggah data menghapusnya dari platform yang ia gunakan, jejak digital dari aktivitasnya berbagi data itu telah terlanjur menyebar di jejaring internet dan tersimpan di peladen. Data-data itu tersedia sepanjang waktu sehingga bisa diakses setiap saat (Sejati, 2020: 2).

Akibatnya, digitalisasi kepada seluruh lini terjadi. Digitalisasi kehidupan mendorong terjadinya *surveillance*. Dalam bahasa Indonesia, istilah *surveillance* mempunyai arti pengawasan. Secara praktik, *surveillance* dilakukan secara vertikal kepada individu maupun kelompok. Menurut hasil analisis Michel Foucault, hal yang mendominasi pada praktik

surveillance adalah panoptikon. Foucault berpendapat bahwa panoptikon sebagai tipe kekuasaan yang diaplikasikan kepada setiap individu melalui pengawasan secara terus menerus dalam bentuk control, hukuman, kompensasi serta koreksi sebagai cara untuk mengubah perilaku individu supaya sesuai dengan norma.

Istilah digital yang digunakan dalam artikel ini bukan semata capaian sains dan teknologi, bukan juga sebagai dikotomi memisahkannya dunia analog, luring (luar jaringan) dan digital (dalam jejaring). Istilah ini digunakan sebagai kondisi ruang media hibrida (*hybrid media space*). Sekaligus konvergensi media antara media lama dan baru (Postill, 2018: 100). Di mana dalam praktiknya, media baru merupakan hasil inovasi dari media lama.

Namun, seiring berkembangnya zaman, lingkup *surveillance* menjadi lebih kompleks. Dalam penggunaan teknologi, misalnya Haggerty & Ericson (Sejati, 2020: 38) menyatakan bahwa *surveillance* di era kontemporer tidak hanya menggunakan satu jenis teknologi, tetapi banyak, bersamaan dan saling terhubung sehingga informasi yang didapatkan bisa semakin rinci. Adapun pelaku atau subjek *surveillance* ada tiga yakni pihak yang berkuasa seperti negara, korporasi yang menambang data untuk keperluan pemasaran, dan pengguna internet.

Lebih jauh, *surveillance* juga dapat dimanfaatkan sebagai eksploitasi data yang berujung pada penyalahgunaan data. Pada ruang digital, *surveillance* memiliki dampak kepada pengguna internet. Beberapa dampaknya yakni menjadi sasaran kontrol (hilangnya kebebasan), merebaknya propaganda dan hoaks, dan kekerasan. Dari tiga dampak tersebut, hal yang paling rentan menyasar kepada gender adalah kekerasan.

Kekerasan dengan segala bentuknya menjadi salah satu dampak *surveillance* digital, mulai dari kekerasan verbal, psikis, ekonomi, fisik, hingga kekerasan berbasis gender. Salah satu kasus yang cukup sering ditemui adalah kebocoran data baik lembaga maupun personal/individu yang berujung pada pemerasan atau *ransom*. Korban kasus pemerasan bisa sangat acak karena siapapun bisa mengalaminya. Orang yang paling rentan menjadi korban adalah orang yang datanya paling lengkap, umumnya karena ia sering membagikan data pribadinya melalui aneka platform digital (Sejati, 2020: 78).

Surveillance menurut Dita yang aktif pada pergerakan mahasiswa 1990-an di Yogyakarta, dalam tesis (Sejati, 2020), berhubungan dengan relasi kuasa yang tidak seimbang. Konteks yang dimaksud Dita, *surveillance* digunakan para penguasa untuk mengontrol yang lebih rendah, demi mempertahankan kekuasaannya. Sementara dalam kasus kekerasan gender berbasis online (KGBO), identitas gender yang dianggap lebih lemah, baik itu perempuan maupun kelompok queer, seringkali rentan menjadi korban.

Tidak hanya itu, *surveillance* juga dapat berubah menjadi praktik tindak kriminal yang mengerikan. Tubuh perempuan dijadikan ajang balas dendam, seperti penyebaran rekaman aktivitas seksual dengan modus *revenge porn*. Tindak kejahatan ini biasanya bertujuan untuk melakukan *ransom* atau menjatuhkan martabat korban. Para pelaku kejatan seringkali telah melakukan *profiling* kepada korban. Mereka memantau aktivitas korban secara daring.

Melihat realitas ini, Dita yang juga aktif dalam jejaring internet feminis global, menekankan diperlukan pedoman internet feminis. Poin krusial yang didesak oleh Dita adalah *Terms of Engagement* alih-alih *Terms*

and Condition bagi setiap aplikasi. Hal ini guna merebut kuasa data, agar tercapai agenda pembebasan di *cyberspace*. Sehingga, data pribadi menjadi kuasa sepenuhnya oleh sang pemilik. Mereka tidak asal memberi data, tanpa mengetahui konsekuensi atau manfaatnya. Gagasan ini juga selaras dengan agenda pembebasan perempuan di *cyberfeminism*. Menciptakan ruang aman dari ketidakadilan gender berupa kekerasan.

SIMPULAN

Cyberfeminisme muncul sebagai respons feminis terhadap politik *cyberpunk*, sekaligus perkembangan teknologi komunikasi di ruang digital. Agenda pembebasan perempuan pada *cyberfeminisme*, yang digaungkan oleh feminis adalah melawan subordinasi. Pada praktiknya, subordinasi merujuk kepada, salah satunya, ketidakadilan gender. Kekerasan seksual yang kerap menimpa perempuan seringkali merupakan manifestasi kedudukan perempuan yang dianggap lemah. Terlebih lagi, kekerasan seksual juga turut menyasar secara daring.

Lebih jauh, *cyberfeminism* adalah upaya feminis untuk membuat gerakan pembebasan perempuan yang lebih baru, yakni dengan membuat atau terlibat ke dalam media alternatif, sebagai “perlawanan” terhadap komodifikasi perempuan. Selain itu, feminis juga harus merebut kuasa data. Sebab, cukup berisiko bila para perempuan yang berkecimpung di dunia digital tidak paham dan secara sukarela menyebarkan datanya ke berbagai platform media.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Alatas, S. and Sutanto, V. (2019) ‘Cyberfeminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Media Baru Cyberfeminisme and Female Empowerment through New Media’, *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), pp. 165–76.

- (2) Andarwulan, T. (2017) 'Cyberfeminis: Wajah Baru Pembebasan Diri Kaum Perempuan', *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 7(1), p. 93. Available at: <https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.160>.
- (3) Arianto, B. (2021) 'Media Sosial sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia', *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, 3(2), pp. 105–117. Available at: <https://doi.org/10.33474/jisop.v3i2.13201>.
- (4) Asry, N. (2018) 'Media Dan Perspektif Feminis', *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 4(2), pp. 1–16. Available at: <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v4i2.629>.
- (5) Dyan, E. *et al.* (2021) 'Www.Konde.Co) Representation Of Neoliberal Feminism On Media Online (Sara Mills ' S Critical Discourse Analysis On'.
- (6) Erika, D. (2019) 'Literasi Digital Perempuan Pada Organisasi Persatuan Istri Prajurit (Persit)', *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), p. 36. Available at: <https://doi.org/10.14710/interaksi.8.2.36-45>.
- (7) Fitri, W. (2017) 'Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan', *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 7(1), p. 67. Available at: <https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.155>.
- (8) Gamble, T.M. (2002) *Communication Works 7th*. Edited by B.M.G.-H. College.
- (9) Gun Gun Heryanto, dkk (2017) *Melawan Hoaks di Media Sosial dan Media Massa*. Yogyakarta: Trust Media Publishing kerjasama dengan Askopis Press.
- (10) Hayati, N. (2021) 'Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19', *HUMAYA: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 1(1), pp. 43–52. Available at: <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1858.2021>.
- (11) Heriyanto, G.G.H. (2018) *Media Komunikasi Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- (12) Herry Christian, J. (2020) 'Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia', *Binamulia Hukum*, 9(1), pp. 83–92. Available at: <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.103>.
- (13) Ira Maulia Nurkusumah, S.M.T.S. (2021) 'Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila', *Res Nullius Law Journal*, 3(2), pp. 162–177. Available at: <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.5100>.
- (14) Istiarohmi, L. (2020) 'Cyberfeminism Sebagai Strategi Untuk Menciptakan Kesetaraan Gender Melalui Teknologi Komunikasi: Studi Etnografi Virtual Terhadap Akun Twitter Magdalene'.
- (15) Kemendikbud (2017) *Materi Pendukung Literasi Digital*. Jakarta: Kemendikbud.

- (16) Postill, J. dan L.C.E. (2018) "Indonesian Religion as a Hybrid Media Space Social Dramas in a Contested Realm", *Asiascape: Digital Asia*, 5(1), pp. 100–123.
- (17) Sadari, S. (2016) 'Post-Feminitas: Teknologi Sebagai Basis Keadilan Gender (Teknopolitik Dan Masa Depan Relasi Gender)', p. 135. Available at: <https://doi.org/10.19109/intizar.v22i1.547>.
- (18) Sadasri, L.M. (2021) 'Women'S Issue on New Media', *Diakom : Jurnal Media dan Komunikasi*, 4(1), pp. 11–24. Available at: <https://doi.org/10.17933/diakom.v4i1.149>.
- (19) Sejati, I.S.W. (2020) *Meretas Kuasa Data, Merebut Ruang Digital. Deteritorialisasi Kekuasaan Melalui Resistensi terhadap Surveillance Digital*. Tesis. Universitas Sanata Dharma.
- (20) Sugiyono (2007) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- (21) Sunarto, N.H. dan A.Y. (2020) *Esensi Kepemimpinan Jurnalis Wanita di Media Pada Era 4.0*. Semarang: CV Alinea Media Dipantara.
- (22) Sutanto, O. (2017) 'Representasi Feminisme Dalam Film "Spy"', *JURNAL E-KOMUNIKASI PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS KRISTEN PETRA, SURABAYA Representasi*, 5(1), pp. 2–10.
- (23) Umami, R.H. (2020) 'Cyberfeminisme: Counter Atas Komodifikasi Tubuh Perempuan Di Media Baru', *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 4(1), pp. 111–36. Available at: <https://doi.org/10.21274/martabat.2020.4.1.111-136>.
- (24) Walters, M. (2021) *Feminis Sebuah Pengantar Singkat*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- (25) Widyastuti, D.A.R., Nuswantoro, R. and Sidhi, T.A.P. (2016) 'Literasi Digital pada Perempuan Pelaku Usaha Produktif di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal ASPIKOM*, 3(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i1.95>.
- (26) Yuniar, A.D. *et al.* (2019) 'Menciptakan Perempuan Cerdas Berinternet Melalui Penanaman Literasi Digital Komunitas "Ruang Berkarya Perempuan"', *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial*, 2(2), p. 47. Available at: <https://doi.org/10.17977/um032v2i2p47-53>.